

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntabilitas sektor publik sebagian besar didasarkan pada laporan keuangan lembaga publik. Pengelolaan kemampuan sektor publik untuk menawarkan kepada publik dengan konten informasi dipengaruhi oleh adanya tuntutan yang berkembang untuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Tujuan akhir akuntansi sektor publik bukanlah informasi keuangan. Data keuangan berfungsi sebagai elemen desain fundamental untuk pengambilan keputusan. Data akuntansi merupakan alat untuk berhasil melaksanakan akuntabilitas sektor publik.

Akuntansi selalu digunakan untuk mengimplementasikan akuntabilitas keuangan. Pada kenyataannya, salah satu kesulitan yang dihadapi akuntansi sektor publik saat ini adalah apakah dapat memberikan data yang mudah diakses untuk melacak akuntabilitas manajerial, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas kebijakan. Bisakah akuntansi digunakan untuk merencanakan dan menentukan arah perkembangan dan pertumbuhan sektor publik.

Sektor publik adalah institusi yang beragam dan rumit. Kompleksitas sektor publik menghasilkan kebutuhan informasi yang lebih luas untuk perencanaan dan pengendalian manajemen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendesentralisasikan sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik, dengan memberikan kewenangan kepada daerah, termasuk otoritas keuangan daerah. Dengan disahkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah melaksanakan reformasi pengelolaan keuangan di pemerintah pusat dan di daerah. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, Gubernur, Bupati, atau Walikota wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berupa laporan keuangan yang telah ditelaah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Standar akuntansi pemerintahan diikuti dalam penyusunan dan penyajian Laporan

Keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Dua Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut teknis penerapan kedua undang-undang tersebut. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terbuka merupakan hasil dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan Permendagri.

Standar akuntansi pemerintahan diikuti dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Dua Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut teknis penerapan kedua undang-undang tersebut. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terbuka merupakan hasil dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan Permendagri. Implementasinya, laporan keuangan harus menjadi kendaraan utama untuk mewujudkan semua tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, SKPD wajib menyusun laporan keuangan sebagai entitas akuntansi yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan komentar atas laporan keuangan. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterbitkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, semua laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (PSAP) berbasis akrual.

Pemerintah daerah dianggap sebagai unit yang independen dan diharuskan membuat laporan keuangan untuk mencegah kerancuan antar unit pemerintah dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah harus mewakili keberadaan organisasi independen. Keberadaan badan yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tanda bahwa premis ini benar adanya. Selain itu, entitas bertugas mengelola sumber daya dan aset yang tidak ada di neraca untuk keperluan pelaksanaan kewajiban utamanya. Ini termasuk tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan atas sumber daya dan aset yang bersangkutan, atas hutang dan piutang yang dihasilkan dari keputusan entitas, dan atas keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Menurut klasifikasi

ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tak terduga dan transfer. Pada Tahun Anggaran 2021 anggaran Belanja Operasi Kecamatan Tanjungsari setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp3.417.506.548,00 sudah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.239.564.939,00 atau 94,79%. Realisasi Sasaran Kinerja Kecamatan Tanjungsari selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat secara ringkas pada Tabel berikut :

Tabel 1. 1
Perbandingan Target dan Realisasi APBD Kecamatan Tanjungsari Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Aspek Belanja untuk Belanja Operasi

Kode Rekening	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi		Selisih
			Rp	%	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.485.257.548,00	2.312.794.956,00	93,06	172.462.592,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	932.249.000,00	926.769.983,00	99,41	5.479.017,00
Jumlah Belanja Operasi		3.417.506.548,00	3.239.564.939,00	94,79	177.941.609,00

(sumber: kecamatan Tanjungsari)

Tahun anggaran 2021 belanja operasi dialokasikan sebesar Rp3.417.506.548,00. Sudah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.239.564.939,00. yaitu untuk anggaran belanja pegawai Rp2.485.257.548,00. Sudah terealisasi Rp2.312.794.956,00 (93,06%), anggaran belanja barang dan jasa Rp932.249.000,00. Sudah terealisasi Rp926.769.983,00 (99,41%). Masih adanya selisih yang belum terlealisasi sepenuhnya dalam penggunaan anggaran belanja daerah, yang mana sisanya itu akan di kembalikan kembali dalam pelaporan keuangan selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk melihat dengan lebih jelas, anggaran dan realisasi mengenai Belanja Modal Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat dalam tabel

perbandingan target dan realisasi belanja modal kecamatan tanjungsari tahun anggaran 2021 berikut ini:

Tabel 1. 2
Realisasi Belanja Modal

Kode Rekening	URAIAN BELANJA	TAHUN ANGGARAN 2021		%	SELISIH
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00

(sumber: kecamatan Tanjungsari)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp9.000.000,00 dari Anggaran Perubahan sebesar Rp9.000.000,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal pada tahun 2021 terserap seluruhnya atau terealisasi 100 %. Laporan ini dibuat dengan menggabungkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) yang salah satunya adalah Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungsari Akhirnya dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan Kecamatan Tanjungsari selama Tahun Anggaran 2021 sudah efektif dari sisi belanja daerah, dan Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungsari Tahun Anggaran 2021 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Nomor 71 Tahun 2010.

Mengingat struktur APBD masih berbeda dengan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungsari Tahun Anggaran 2021 masih dalam proses konversi. Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang merupakan salah satu komponen SAP menjelaskan persyaratan implementasinya. Konversi bertujuan untuk menyesuaikan dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan serta format pelaporan. Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang bertekad untuk terus meningkatkan kualitas sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021.

Beberapa komponen item yang paling penting dalam laporan keuangan utama, antara lain sebagai berikut, dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang penyusunan laporan keuangan daerah:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tujuan pelaporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi yang membantu dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan bahwa organisasi pelapor bertanggung jawab atas kekayaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Tanjungsari. Oleh karena itu, transparansi publik administrasi pertanggungjawaban publik atas pelaporan anggaran merupakan salah satu hal yang sangat diprioritaskan oleh aparatur pemerintah di Kecamatan Tanjungsari, sehingga selalu menjunjung tinggi prosedur yang telah ditetapkan karena sesuai dengan kepuasan publik merupakan komponen utama dalam sebuah laporan. Namun, penulis berpendapat bahwa meskipun aparat telah berupaya untuk menjalankan fungsinya dengan benar, sejumlah masalah masih teridentifikasi :

1. Tidak terealisasinya sebagian anggaran karena melebihi kebutuhan.
2. Adanya kenaikan beberapa bahan baku, yang diperkirakan akan berdampak kepada berkurangnya realisasi penganggaran di Tanjungsari Kabupaten Sumedang kepada masyarakat.
3. Sebagian masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia.
4. Realisasi anggaran belum seluruhnya tercapai kepada masyarakat, terutama program pada kegiatan fisik, sehingga belum bisa dirasakan oleh masyarakat

Maka dengan penjelasan di atas, penulis tertarik membahas penelitian ini secara konklusif agar pelaporan keuangan daerah dapat terlaksana secara akuntabilitas efektif dan

efisien Oleh karenanya, penulis membuat suatu penelitian dengan judul; "MANFAAT LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENINGKATKAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN TANJUNGSARI."

1.2 Identifikasi Masalah

Mencermati konteks tersebut, ditemukan permasalahan dalam penelitian ini yang sejalan dengan temuan observasi lapangan, seperti kurangnya perencanaan penyusunan laporan keuangan yang menyebabkan anggaran tidak terserap dengan baik oleh aliran dana.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepatuhan dan pengelolaan dalam penyusunan laporan keuangan di kantor kecamatan tanjungsari
2. Bagaimana akuntabilitas dan pelaporan retrospektif dalam memonitoring laporan keuangan di kantor kecamatan Tanjungsari
3. Bagaimana perencanaan dan informasi otorisasi dalam perencanaan dasar laporan keuangan di kantor kecamatan Tanjungsari
4. Bagaimana laporan keuangan dapat menjadi alat komunikasi kepada publik dan pihak kepentingan lainnya
5. Bagaimana laporan keuangan dapat memberikan informasi dua arah antara instansi dengan pihak masyarakat

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas serta transparansi pada pelaporan keuangan, serta bagaimana pelaporan keuangan dapat mempengaruhi kelangsungan suatu program.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparaturnya Pemerintah Kecamatan Tanjungsari dalam memberikan pelayanan pelaporan realisasi anggaran, serta sebagai informasi baru bagi penulis dan pembaca, serta bagi instansi terkait dan penelitian lainnya, sebagai sumber informasi. ketika meneliti masalah yang berkaitan dengan keuntungan pelaporan. pembiayaan untuk mendongkrak potensi pendapatan daerah.

2. Secara Praktisi

Diharapkan penelitian penulis dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang fungsi lembaga legislatif dan eksekutif dalam pelaporan anggaran kepada khalayak yang tepat. Temuan penelitian ini, khususnya bagi pemerintah daerah, diyakini dapat dijadikan pedoman dan rekomendasi bagi organisasi terkait dalam menyusun kebijakan dan juga dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk mencegah keraguan tentang validitas penelitian, sebuah penelitian harus didasarkan pada teori yang bersangkutan. Tiga teori berikut digunakan dalam penelitian ini.

Pertama, *Grand Theory* yang digunakan adalah teori administrasi publik. Mengutip (Pasolong 2019) mendefinisikan bahwa “Administrasi publik ialah kombinasi teori dan praktek yang kompleks. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pemerintah dan rakyat yang berada dibawah kendalinya, dan mendorong kebijakan publik untuk merespons kebutuhan sosial lebih cepat.”

Kedua, *Middle Theory* teori yang digunakan adalah keuangan negara. Mengutip M. Ichwan dalam (W.Riawan Tjandra 2010) mengatakan bahwa; keuangan negara merupakan rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka- angka diantaranya diwujudkan dengan mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.

Ketiga, *Applied Theory* teori yang digunakan adalah teori laporan keuangan menurut (Mardiasmo, 2009). Laporan keuangan merupakan komponen terpenting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan, terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan.

Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Berikut ini dimensi dari laporan keuangan menurut (Mardiasmo, 2009). Diantaranya:

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance stewardship*).

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*planning and outirhization information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan organisasi (*viability*):

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*public relation*):

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*):

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Bagan 1. 1
Kerangka Pemikiran

